

Site Plan

SKALA 1 : 5000



LEGENDA GAMBAR

NOCTA	SETIAKSIAN
A	Sempadan Jalan Keatas
B	Ayau Jalan Baru
C	SILOK PANGKAP
D	SALUKA
E	ERTAKAN KANTOR
F	Sempadan Pantai
G	Kotakan Terapi Wada
H	Kawasan Binau DAP
I	Kawasan Binau DAP
J	Kawasan DAP
K	Kawasan DAP
L	Kawasan DAP
M	Kawasan DAP
N	Kawasan DAP

PROGRAM	BANJUAN INTEL SWADAYA (015)
KELOMPOK	PEMBANGUNAN BARU KAWAN LABOK KOMPTER SIA NERU III DOTA PALDANG BANGKAS
DAFTAR	
DISAIN	
PROJEKSI	Kepala Projek Pembangunan KAWAN NERU III DOTA PALDANG
DISAIN	
SKALA	1:1,000
NOCTA	
NOCTA	

## Appendix 2. The Interview Results.

### 1. Budi Hariyanto, ST

Jawaban :

Ⓘ Pengaruh luas lahan pemukiman / perumahan.

Luas lahan perumahan / pemukiman di th. 2004 lebih luas dari rencana pertukaran lahan pemukiman / perumahan pada RTRW Kota Padang Panjang th. 1994 - 2004 :

- (1). Pembagian pemukiman yg dilaksanakan oleh Masyarakat Desa / individu sebagian. Pertumbuhannya sangat signifikan sepanjang jalan yg ada. dan juga sebagian pemukiman status pertukaran tanah. Kanan. Jarak - yg merupakan ahli waris tanah Kanan. yg sebagian berada diluar lahan pemukiman / perumahan.
- (2). Pemukiman lahan pemukiman / perumahan pada RTRW 1994 - 2004 sebagian berada pada lahan:
  - Tanah Kanan / Tanah adat yg belum / tidak dibagi
  - Kondisi topografi yg > 25 %.Sehingga th. menyisihkan untuk dibagun pemukiman / perumahan.
- (3). Bagian pemukiman / perumahan yg melayor 108 - / 114 Sisa. dan pemukiman lahan. dan pemukiman lahan dan pada tidak di tempatkan secara maksimal.
- (4). Pertumbuhan. kebutuhan pemukiman / perumahan. yg cukup besar sementara pemukiman lahan terbatas. karena kendala seperti point (1) (2) (3). dan pemukiman untuk pemukiman lahan yg pemukiman diluar pemukiman / perumahan. seperti lahan pertanian yg th. produktif dan subur telah dapat di tempatkan.

Contoh pemukiman lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman / perumahan adalah di Sago. Kelantan. Halau Kecamatan RTM.

Ⓙ Perbedaan jumlah proses pendidikan antara RTRW 1994 - 2004 Kota Padang Panjang dengan realisasi.  
th. th. 2004. ad:

- Jumlah TK < Rencana.
- Jumlah SD, SLTP, SLTA > rencana.

(1) Dalam penyalangannya pada Bidang Pendidikan, Pejabat TK, aka: kebajikan, dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota. Selama sebelum, Month Januari TK. Melalui Melalui PAOD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Unit Kerja PAOD. Kelengkapan PAOD. Sdk banyak pada pejabat Kalimantan. Lhd ini sangat berpengaruh, Fasilitas Pendidikan TK.

(2) Pada Pejabat SD, SLTP, SLTA. proses belajar mengajar harus mengacu pada SPM (Standar Pelajaran Nasional) Pendidikan yang al: Kapasitas kelas / ruang belajar minimal 30 mudi / orang. antara ( dari Analisis Kebutuhan Ruang pada RTM 1994 - 2004. Disamping itu juga pada Pejabat SD, SLTP, SLTA dilasa bidang Ruang juga mencakup Murid / Siswa yg berada diluar Kelas PAOD / Ruang Kebutuhan Spati. Kebutuhan tanah Datar dan Kabupaten Padang Panjang lhd ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Luas (APK) yg berada diatas 100%.

Kondisi demikian yg sangat berpengaruh terhadap penyalangan jumlah SD, SLTP, SLTA.

(iii) Cara Pengawasan oleh RTM dapat berpengaruh dalam Nasional:

- (1) Mempertajam ~~data~~ analisis: - Potensi  
- Kebutuhan Ruang pada Kawasan Bumi Daya  
- Kemungkinan lahan / Dty Dedy lahan  
- Faktor eksternal yg mempengaruhi seperti Struktur kebutuhan ruang SPM pada masing-masing Bidang Fasilitas


(2) Pencapaian Sanksi pelayanan Person Bangunan dan Penyalangan. atun lunda: Lainnya yg terlewat

④ Pengembangan teknologi tenaga Faltan:

- (1) Asumsi Faltan ditawal y Fdk Maximal
- (2) Analisis y karamy Tajam
- (3) Menempun Sanksi Pankady Fdk Maximal

⑤ RTAW - kaji Peday Panyg thp 1994 - 2004. Faltan .  
diguwaha Seaman Maximal pada setiap pengumuman .  
Dahului Pucunuan . di kasa P.

Pantun Panyg 5/6 - 2004 .  
Kepala Bappda Kota P. Pang.  
Budi Hainigoto Lt. I  
1954 07 04 1979 03 1006.

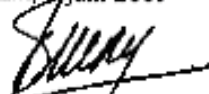




## 2. Drs. Andry. K

- 1.- Penyimpangan pada lahan permukiman sebelumnya tidak ada dalam RTRW Kota Padang Panjang dari tahun 1994 – 2004. Yang terjadi adalah pembangunan rumah-rumah penduduk yang mengikuti fasilitas – fasilitas lainnya, seperti pembangunan sarana pendidikan, dalam hal ini bangunan perumahan tsb tidak memenuhi ketentuan aturan yang berlaku.
  - Yang terjadi selama kurun waktu 1994 - 2004 pada RTRW Kota Padang Panjang adalah perubahan peruntukan lahan agraris menjadi non agraris
  - Contoh : Pembangunan Kantor DPRD di Kel. Guguk Malintang, mengakibatkan terjadinya pembangunan perumahan disekitar perkantoran tersebut.
  - Hal ini disebabkan sistem pengairan yang kurang berfungsi, karena pada wilayah tersebut tidak mempunyai irigasi teknis.
  - Terjadinya penyimpangan pada peruntukan lahan yang tercantum pada RTRW Kota Padang Panjang disebabkan oleh :
    - Belum terealisasinya penggunaan lahan yang sudah ditentukan secara optimal
    - Khusus untuk pembangunan pendidikan dalam RTRW sifatnya secara menyebar ( sistem acak).karena belum adanya peruntukan lahan khusus untuk pendidikan.
    - Ini terjadi pada penggunaan lahan industri dan lahan konservasi dalam RTRW yang terletak pada Kel. Silaing Bawah dan Kampung manggis.
  - Contoh :
    - Pembangunan Sekolah SMU 3
    - Pembangunan Sekolah MAN
    - Pembangunan Kantor Polres pada peruntukan lahan sarana dan prasarana olah raga
2. Jumlah sarana pendidikan memang jauh sekali pertambahannya, karena Padang Panjang sebagai Kota tujuan pendidikan yang menyebabkan wilayah/daerah interland banyak yang migrasi ke Kota Padang panjang untuk mengikuti pendidikan.
  - Contoh :
    - Pembangunan SMU Negeri 3
    - Pembangunan MAN
    - Pembangunan SMU Unggul
    - Pemabangunan pendidikan Serambi Mekah
    - Pemabangunan sekolah Thawalib di Guguk Malintang
3. Untuk mengatasi hal tersebut diatas perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait dan sebaiknya instansi yang menangani keuangan hendaklah berdiri sendiri sehingga dapat memutuskan dan mengatasi masalah masalah keuangan. Disamping itu juga dibuatkan aturan dan sanksi yang jelas lagi pelaku pelanggaran tersebut
4. Dalam penyusunan RTRW, sudah melalui tingkatan dan aturan yang mendukungnya, yaitu UU No. 24 tahun 1992 tentang Penatan Ruang yang sekarang diganti dengan UU No. 26 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah
5. RTRW 1994-2004 perlu ditinjau kembali dan dievaluasi guna penyusunan RTRW yang baru, karena adanya penyimpangan dalam penggunaan lahannya, dan RTRW juga merupakan acuan dalam penyusunan Properda/Renstra Kota

Wassalam, 8 Juni 2009

  
Drs. Andry. K

### 3. Maisir. T, SE

**Nama : MAISIR THAIB**  
**JABATAN : KASI WASDAL KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

#### **JAWABAN QUESTIONER**

1. Terdapat penyimpangan luas pemukiman s/d tahun 2004 :
  - Faktor penyebab peningkatan luas pemukiman antara lain :
    - a. Disebabkan kebutuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu :
      - Masih banyak penduduk tinggal pada bangunan tidak layak huni atau tinggal di kamar sewaan atau rumah kontrakan.
      - Kebanyakan lahan masih berstatus tanah adat yang hak penguasaannya masih dipegang oleh kepala waris, tanah tersebut belum dibagi kepada kaumnya.
      - Perwujudan Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan mengandung konsekwensi timbulnya pertambahan jumlah penduduk tidak tetap yaitu siswa yang menetap 5 hari dalam seminggu, namun mereka membutuhkan tempat tinggal untuk berlindung dan istirahat.
      - Kultur masyarakat Minangkabau yang suka merantau juga dapat menjadi penyebab peningkatan penggunaan lahan untuk pemukiman, terutama mereka yang beruntung usahanya, membangun rumah di kampung halaman untuk tempat berkumpul dan menginap ketika pulang di waktu lebaran dan hari libur sekolah/nasional lainnya.
    - b. Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang sangat besar terhadap kemajuan pembangunan daerah, kewenangan pembangunan yang sebelumnya berada pada Pemerintah Pusat dan Provinsi diserahkan penyelenggaraannya ke daerah.
    - c. Dalam menyikapi pelaksanaan Otonomi daerah tersebut Pemerintah Kota menyusun Propeda Tahun 2001 – 2005 (Perda No. 11/2001), diantaranya prioritas pembangunan Pemukiman yang bertumpu pada inisiatif penduduk dan pencaangan Padang Panjang Kota Pendidikan.
    - d. Substansi RTRW sendiri juga ada kelemahan karena analisis kebutuhan dilakukan atas dasar data yang invalid, seperti memprediksikan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan 0,29 % sesuai kondisi sebelumnya.

- Kota Padang Panjang memiliki luas wilayah yang terbatas, dan hanya sekitar 21 % lahan yang efektif untuk dibangun ( kemiringan 0 – 15 %), akibatnya penduduk yang hanya memiliki lahan yang peruntukannya untuk pertanian basah, terpaksa memanfaatkan lahan tersebut untuk bangunan rumah tinggal, pembangunan seperti ini cukup banyak terjadi dan pada umumnya tidak memiliki IMB.

Contoh : Pembangunan Real estate tidak ada dalam rencana RTRW, hal itu disebabkan keterbatasan lahan tersedia untuk pengembangan pemukiman, namun dapat direalisasikan meskipun dalam jumlah terbatas : seperti ; Perumahan Perbukitan Teduh di Kelurahan Koto Panjang, dibangun secara berjenjang dengan meratakan sebagian lahan yang miring.

Pembangunan perumahan/pemukiman pada lahan yang peruntukannya bukan untuk pemukiman :

- o Hal itu antara lain disebabkan :
  - Lemahnya penerapan hukum.
  - Keterbatasan lahan untuk pembangunan sehingga timbul tekanan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- o Contoh : Pemukiman penduduk tanpa izin pada lahan GOR Bancah Laweh di Kelurahan Koto Panjang.

2. Luas lahan untuk Pendidikan juga melebihi rencana :

- Penyimpangan jumlah TK berkemungkinan disebabkan kesalahan interpretasi data yang melakukan analisis berdasarkan jumlah anak umur 0 – 4 tahun.
- Perubahan pada jumlah SD, SLTP dan SLTA antara lain disebabkan :
  - o Terjadi lonjakan jumlah calon murid setiap tahunnya yang sebagian besar berasal dari penduduk Hinterland (Kab. Tanah Datar dan Padang Pariaman).
  - o Tambahan alokasi sekolah dari Pemerintah Propinsi (SMA 2)
  - o Perwujudan Citra Kota Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan Bernuansa Islami, mengandung konsekuensi perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Padang Panjang.



Contoh pembangunan sekolah yang tidak ada dalam rencana :

- Pembangunan MAN Balai-Balai pada tahun 1996 perencanaan dan pembangunannya dilakukan oleh Departemen Agama, daerah memfasilitasi dalam penyediaan lahan.

3. Cara Mengatasi terjadinya penyimpangan sehingga RTRW berjalan sesuai fungsinya.
  - Melakukan validasi data sebagai bahan dasar untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat.
  - Melakukan analisis secara komprehensif melibatkan berbagai stakeholder dan tenaga ahli dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga mampu menggali dan mengembangkan segala potensi dan optimis menetapkan target ke masa depan.
  - Penerapan sanksi hukum secara konsisten terhadap pelanggar RTRW baik terhadap para pelaku pembangunan yang melanggar maupun Pejabat yang menerbitkan izin pada lahan yang tidak sesuai peruntukannya.
4. Penyusunan RTRW 1994 – 2004 disusun berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, namun pengerjaan analisisnya kurang maksimal. Proses penyusunan ada melibatkan perwakilan masyarakat, namun dalam kapasitas yang masih terbatas, terutama disebabkan keterbatasan penguasaan terhadap substansi pembahasan RTRW itu sendiri.
5. Selama ini RTRW tetap dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan, penyimpangan yang terjadi tidak dapat dihindari disebabkan tuntutan perkembangan yang diluar kendali daerah terutama karena adanya perubahan dalam pembagian kewenangan pemerintah.